

Penyidik KPK Sebut Tak Bisa Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tim penyidik tidak bisa menerima surat konfirmasi ketidakhadiran pemeriksaan yang dikirimkan kuasa hukum Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.

Gus Muhdlor sedianya diperiksa pada Jumat (3/5) dalam kapasitasnya sebagai tersangka korupsi pemotongan dan penerimaan insentif di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. Ia tidak hadir dan mengirimkan surat kepada penyidik. Namun, dalam surat itu tidak dilengkapi alasan ketidakhadiran.

"Penyidik KPK tentu tidak bisa menerima konfirmasi ketidakhadiran yang tidak disertai dengan alasan tersebut," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Jumat (3/5).

Jika memang menghormati proses hukum, Gus Muhdlor seharusnya memenuhi panggilan tim penyidik. KPK juga mengingatkan kuasa hukum Gus Muhdlor yang seharusnya mendukung kelancaran proses hukum.

"Bukan justru memberikan saran-saran yang bertentangan dengan norma-norma hukum," ujar Ali.

Ali mengingatkan,

KPK bisa menjerat pihak-pihak yang mengganggu jalannya penyidikan dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal itu memuat ancaman pidana bagi pihak yang secara sengaja diduga merintangi penyidikan.

"KPK tak segan menerapkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (UU Tipikor)," tutur Ali.

Sebagai informasi, KPK sebelumnya telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan itu secara patut kepada Gus Muhdlor pada 26 April lalu.

Panggilan itu merupakan yang kedua kalinya setelah Gus Muhdlor absen pada panggilan pertama sebagai tersangka pada 19 April dengan alasan sakit.

"Namun hari ini kami menerima surat konfirmasi dari kuasa hukumnya, bahwa Ahmad Muhdlor tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut tanpa disertai alasan ketidakhadirannya," tutur Ali.

Meski demikian, Ali belum mengungkapkan langkah hukum apa yang akan ditempuh KPK terhadap surat ketidakhadiran Gus Muhdlor.

● han

Dampak Erupsi Gunung Ruang, BNPB: 9.083 Warga Dievakuasi

JAKARTA (IM) - Sebanyak 9.083 warga mulai dievakuasi, terutama mereka yang berada di Pulau Tagulandang dalam radius 7 kilometer (km) dari pusat erupsi Gunung Ruang, Kabupaten Situro, Sulawesi Utara.

Evakuasi ini merupakan rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) setelah area bahaya diperluas dari 6 km menjadi 7 km.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto hingga sudah ada 3.364 pengungsi yang telah dievakuasi keluar dari Pulau Tagulandang.

Sementara itu masih ada 5.719 jiwa dalam proses evakuasi yang dilakukan secara bertahap. Hal itu diungkapkan Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Erupsi Gunung Ruang di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kota Manado, kemarin.

"Paling tidak ada sembilan ribu lebih warga dalam radius 7 kilometer

yang segera harus diungsikan," jelas Suharyanto dalam keterangan resminya, Jumat (3/5/2024).

Adapun proses evakuasi warga ini dilakukan menggunakan beberapa armada kapal seperti KM Glory Mery, KRI Kakap-811, KM Marina Bay, KM Lohoraung, KPL Basarnas, KM Lokongbanua, KM Barcelona Lui dan KM Beacukai.

Proses evakuasi ini dilakukan secara bertahap sejak 30 April hingga 2 Mei 2024 dan diharapkan dapat selesai dalam waktu tiga hari kedepan.

"Mudah-mudahan dalam tiga hari ini proses evakuasi ini bisa selesai," kata Suharyanto.

Sementara itu, lokasi pengungsian sementara bagi warga yang dievakuasi ini telah disiapkan oleh pemerintah di beberapa titik seperti Sentra Tumou Tou Manado, Sentra di Paal 4 UPT Kemensos, Bapelkes Malalayang, BLK Bitung, Pulau Siau dan beberapa wilayah lain secara mandiri. ● mei

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Pengacara Lucas terkait Kasus Nurhadi

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Pengacara kondang, Lucas, di kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.

Sejatinnya Luca diperiksa pada Kamis (14/3) lalu, namun yang bersangkutan mangkir.

"Saksi Lucas memang pernah dipanggil ya untuk perkara NHD saat itu, nanti kami akan konfirmasi kembali kapan akan dijadwalkan ulang, karena saat itu kan tidak hadir," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (3/5).

Ali masih belum mengetahui kapan tim penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Lucas.

Namun memang, diakui Ali, keterangan Lucas dibutuhkan untuk proses penyidikan TPPU Nurhadi.

Diduga, ada keterlibatan Lucas dalam kasus Nurhadi.

"Ya pasti ada keterkaitan dengan dugaan korupsi mantan sekretaris Mahkamah Agung saat itu. Pasti materi pemeriksaan belum bisa kami sampaikan ketika saksi belum hadir," ungkap Ali.

Ali mengatakan bahwa keterangan Lucas sangat dibutuhkan oleh KPK dalam perkara Nurhadi. Oleh karenanya, KPK mengimbau agar Lucas kooperatif dengan kekuasaan undang pemeriksaan untin perkara Nurhadi.

"Yang pasti ketika seorang penyidik membutuhkan keterangan seorang sebagai saksi untuk memperdalam informasi dan data pada proses penyidikan pasti dipanggil," ujarnya.

"Karena salah satunya tadi Pak Lucas sebagai Pengacara, pasti kami panggil juga sebagai saksi untuk memperdalam segala informasi," ujarnya. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PEMUSNAHAN ROKOK ILEGAL
Petugas Bea dan Cukai melakukan pemusnahan rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Lhokseumawe, Aceh, Jumat (3/5). Sebanyak 298.000 batang rokok non cukai atau ilegal berbagai merek dan jenis hasil tangkapan tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar.

Aparat Gabungan Gagalkan Upaya KKB Kuasai Kawasan Homeyo Intan Jaya

Akibat aksi gangguan bersenjata dan pembakaran yang dilakukan OPM di Homeyo menimbulkan ketakutan dan melumpuhkan aktivitas masyarakat.

JAKARTA (IM) - Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua lagi-lagi menebarkan teror kepada masyarakat. Mereka pun ingin menguasai wilayah Homeyo. Untung saja Aparat Keamanan (Apkam) Gabungan TNI-Polri sigap, dengan cepat berhasil menggagalkan aksi KKB yang sudah tiga hari berusaha menguasai kawasan tersebut.

Panglima Kogabwilhan

III, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan, aksi OPM tersebut dimulai dengan serangan terhadap Polsek Homeyo pada 30 April 2024.

"Yang mengakibatkan seorang remaja bernama Aleksander Parapak meninggal dunia, serta dilanjutkan dengan aksi pembakaran bangunan SD Inpres Pogapa pada hari Rabu (1/5), dan upaya penyerangan terhadap Kora-

mil 1705-05/Homeyo pada tanggal 2 Mei 2024," papar Richard dalam i keterangan resmi, Jumat (3/5).

Dampak serangan OPM selama tiga hari di Homeyo telah menimbulkan ketakutan bagi masyarakat setempat. Bahkan, ada beberapa masyarakat yang pergi mengungsi mengamankan diri.

"Akibat aksi gangguan bersenjata dan pembakaran yang dilakukan oleh OPM tersebut juga melumpuhkan aktivitas masyarakat setempat," ucapnya.

"Menindaklanjuti aksi biadab OPM, maka pada hari Jumat (3/5), Apkam TNI Polri melancarkan Operasi Penindakan terhadap OPM

yang berada di wilayah Distrik Homeyo," ujarnya.

Apkam Gabungan TNI Polri tersebut, kata Richard, melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI (KOOPTNI) HABEMA dan Satgas NANGGALA Damai Cartenz.

"Hasil yang didapatkan dari operasi tersebut adalah berangsur-angsur pulihnya situasi keamanan wilayah Distrik Homeyo dari aksi-aksi sporadis OPM," kata Richard.

Richard menegaskan, penguasaan keamanan tersebut sangat berarti bagi kelancaran dan situasi kondusif kehidupan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitas sehari-hari.

"Operasi penindakan tegas terhadap OPM di wilayah Distrik Homeyo merupakan upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua," tandasnya. ● han

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

JAKARTA (IM) - Kuasa hukum Partai Gerindra, Herfino Indra Iskandar, keliru mengajukan petium dalam sidang gugatan sengketa hasil pemilihan legislatif (Pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam petium yang diajukan, pihak Partai Gerindra selaku pemohon, justru meminta MK supaya membatalkan permohonan. Kekeliruan ini lantas menjadi sorotan dan dikoreksi oleh Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat saat menyidangkan Perkar Nomor 31-01-02-25/PHPU. DPR- DPRD- XXII/2024 dengan pokok perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Sulawesi Utara Tahun 2024..

"Membatalkan permohonan keputusan KPU," kata Herfino dalam sidang yang disiarkan di YouTube MK, Jumat (3/5).

Mendengar petium ini, Hakim Arief lantas memotong dan mempertanyakan kalimat yang dibacakan Herfino.

"Yang dibatalkan putusannya atau permohonannya? Permohonan siapa yang di-

batalkan ini?" tanya Arief. Herfino menjawab bahwa yang pihaknya minta untuk dibatalkan adalah putusan MK. Hakim Arief lantas menjelaskan maksud dari bunyi petium yang tertulis dan dibacakan berarti meminta permohonan Partai Gerindra selaku pemohon.

"Kalau membatalkan permohonan berarti permohonan Anda yang dibatalkan," jelas Arief.

Herfino pun menyampaikan koreksi. Namun, Arief tetap melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa kesalahan seperti itu tidak diperbolehkan. Menurutnya, kesalahan itu berakibat pada kaburnya bunyi permohonan Partai Gerindra.

"Ini membatalkan permohonan permohonan. Ini apa yang dimaksud ini?" cecar Arief.

Herfino lantas mengakui bahwa petium tersebut salah tulis. Sementara, Arief memutuskan agar persoalan itu ditanggapi pada waktu berikutnya. Ia kemudian meminta Herfino melanjutkan membaca petiumnya.

Dalam permohonan itu, Pihak Partai Gerindra memin-

ta Putusan KPU Nomor 360 dibatalkan. Herfino juga meminta Mahkamah memerintahkan KPU selaku termoohon menggelar pemilihan suara ulang (PSU) Dapil Mihanasa Selatan 3 untuk mengisi anggota DPRD daerah tersebut.

"Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini atau MK berpendapat lain mohon diputuskan seadil adilnya," kata Herfino.

Dalam kesempatan itu, Herfino mengungkap sejumlah dugaan kecurangan. Di antaranya adalah adanya perbedaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan daftar hadir di 9 tempat pemungutan suara (TPS).

Kemudian, terdapat arahan dari Penjabat (Pj) Ketua Dewan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Stefanus Lumowa, Pj kepala desa, dan anggota dewan PDI-P Jony Omleng untuk memenangkan PDI-P. Arahan tersebut terekam dalam video yang diajukan sebagai barang bukti di muka sidang.

"Untuk memenangkan PDI-P termasuk mengambil suara Gerindra dengan segala cara," ujar Herfino. ● mei



DAPUR HIGIENIS LAPAS PADANG

Sejumlah tahanan pendamping (tamping) menyiapkan makanan untuk warga binaan di dapur higienis Lapas kelas II A Muaro Padang, Sumbar, Jumat (3/5). Dapur tersebut merupakan yang pertama di provinsi itu menerapkan dapur higienis yang diberi nama Dapur Basalero sebagai wujud komitmen Kemenkumham dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan yang tengah menjalani masa hukuman.

Kejati Bali OTT Oknum Bendesa Adat yang Diduga Memeras Pengusaha

BALI (IM) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali melakukan Operasi Tangkap Tanganan (OTT) terhadap oknum Bendesa Adat yang diduga melakukan pemerasan terhadap pengusaha. Dalam OTT itu disita uang ratusan juta serta sejumlah unit mobil.

Kepala Seksi Penerangan Hukum, Putu Agus Eka Sabana mengatakan, OTT ini merupakan tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke Kejati Bali.

"Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke Kejaksaan Tinggi Bali serta komitmen pemerintah dalam memberantas praktek-praktek mafia investasi dan mafia tanah," ucap Agus dalam keterangannya, Jumat (3/5).

Dalam OTT ini, kata Agus, Tim Penyidik Kejati Bali mengamankan KR dan AN (seorang pengusaha) serta dua orang lainnya yang bersama pelaku di Resto Cassa Eatry Jl. Raya Puputan Nomor 178 Renon-Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali pada Kamis 2 Mei 2024.

"Mereka diamankan diduga telah melakukan pemerasan yang dilakukan oleh KR kepada AN terkait investasi yang akan dilakukan oleh AN di daerah Desa Adat Berawa, KR adalah pejabat Bendesa Adat Berawa Kabupaten Badung," ungkapnya.

Agus menjelaskan, salah satu syarat proses investasi

yang dilakukan oleh AN harus mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari KR, agar proses transaksi investasi dapat diproses lebih lanjut. KR kemudian meminta uang kepada AN sebesar Rp10 miliar sebagai syarat agar proses transaksi disetujui oleh KR.

Kemudian, pada Maret 2024, AN menyerahkan uang sebesar Rp50 juta kepada KR di kafe daerah Kuta. Selanjutnya, penyerahan kedua sebesar Rp100 juta.

"Pertemuan AN dengan KR tersebut merupakan penyerahan sejumlah uang yang merupakan bagian dari permintaan KR kepada AN," ujarnya.

Agus mengatakan, dalam OTT ini ada sejumlah barang bukti yang turut diamankan, di antaranya bundelan kresak kantong warna kuning berisi amplop yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp100 juta, kendaraan Toyota Portuner, 2 buah Handphone (yang masih diverifikasi).

Agus menyebut, pihaknya mengambil langkah-langkah tegas terhadap pelaku untuk menjaga iklim investasi, baik investor di luar dan dalam negeri, di Bali merasa nyaman dan sehat.

"Ini untuk menjaga nama baik Bali dimata investor di luar negeri, menjaga marwah desa adat di Bali agar tidak disalahkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi da lain-lain," tandasnya. ● han



KESIAPAN SARANA DAN PRASARANA WORLD WATER FORUM

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong memberikan keterangan kepada wartawan dalam acara diskusi Ngopi Bareng Kominfo di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, (3/5). Usman Kansong mengatakan bahwa kesiapan sarana dan prasarana penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 yang diselenggarakan di Bali pada 18-25 Mei 2024 sudah mencapai 50 hingga 60 persen